

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman judul	i
Motto	iii
Kata pengantar	iv
Kata sambutan promotor	xv
Kata sambutan mantan kadiv hukum polri	xx
Abstract	xxiv
Glosary	xxvi
Daftar isi	xxxv
BAB I PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang Masalah	I
B. Politik dan Hukum	13
C. Perspektif Hukum dan Masalah Konflik	22
D. Tugas Polri dalam Penyelesaian Konflik dalam Kebijakan Hukum (Criminal Policy)	26
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN PERKEMBANGAN TUGAS POLRI BERPERSPEKTIF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)	33
A. Strategi Model Polisi Pendamai Berperspektif Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Instrumen Internasional	40
B. Landasan Hukum POLRI dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) Berperspektif Hukum	50
C. Landasan Hukum POLRI dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) Berperspektif Norma Agama	59
D. Landasan Hukum POLRI dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) Berperspektif Instrumen Internasional dan HAM	69

E.	Landasan Hukum POLRI dalam Melaksanakan Kamtibmas	75
F.	Tugas dan wewenang POLRI dalam Penyidikan Menurut KUHAP, dan Penyidikan bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	77
G.	Tugas dan Wewenang POLRI dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1997 yang Diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI	86
H.	Pedoman Kerja dengan Kode Etik Kepolisian	90
I.	Keunggulan Kewenangan Diskresi Kepolisian Berperspektif Norma Hukum dalam Penyelesaian Perkara	93
BAB 3	POLA KEBIJAKAN POLRI	103
A.	Doktrin dan Konseptual Pencegahan	103
1.	Doktrin The Strong Hand of Society dan Paham Militerisme Polisi	103
2.	Doktrin The Soft Hand of Society dan Paham Sipilisme Polisi	110
3.	Konseptual Strategi Penyelesaian Konflik Sosial Politik	115
B.	Pola Kebijakan Umum	123
C.	Kebijakan Bimmas Polri	127
D.	Pengaruh Kekuatan sosial Politik Terhadap Tugas dan Kewenangan Polri	133
1.	Model masyarakat dan negara dalam Teori Konflik	133
2.	Hukum sebagai Sarana Pengendali Konflik dan Pengintegrasikan Sosial yang Efektif	138
3.	Metode Pendekatan Struktural Fungsional dan Pendekatan Konflik	144
4.	Sumber-sumber dan Bentuk Penyelesaian Konflik Sosial Politik	148

BAB 4	TRAGEDI KEMANUSIAAN DALAM PEMILU 1999 DI JEPARA DAN PEMILU 2004 DI MAGELANG	155
A.	Gambaran Umum	155
1.	Pembentukan dan Pembubaran Partai Politik	155
2.	Lokasi Penelitian	161
3.	Konflik Antarpending Partai Politik di Magelang Tahun 2004	169
B.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Konflik antar Pendukung Partai Politik	175
1.	Kepentingan Partai Politik	175
2.	Pemahaman Islam sebagai agama dan Islam sebagai Partai Politik	177
3.	Provokasi terhadap Pendukung Partai	180
4.	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Konflik antar Pendukung Partai Politik	182
5.	Langkah-Langkah atau Upaya-Upaya POLRI dalam Penyelesaian Konflik di Desa Dongos Kecamatan Kedung	192
BAB 5	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUGAS DAN KEWENANGAN POLRI	197
A.	Upaya Penal/Penyidikan.	202
B.	Upaya Kepolisian dalam Menangani Konflik dengan Cara Perdamaian	206
C.	Masalah-Masalah yang Dihadapi POLRI dalam Melaksanakan Kewenangannya	209
D.	Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Dapat Dicabut.	212
E.	Sejarah Tugas dan Peranan Strategi Kepolisian dalam Penyelesaian Konflik Antarpending Partai Politik	219

F.	Praktek Penyelesaian Masing-masing Perkara Oleh Kepolisian Berbeda-beda	224
G.	Keteladanan Polisi Untuk Mempelopori Budaya Malu dan Berani Mencela Penyimpangan (Agent Of Shame Culture)	230
BAB 6	TEORI MODEL POLISI PENDAMAI BERPERSPEKTIF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)	239
A.	Model Perdamaian Mabes POLRI	254
B.	Model “Perdamaian” Konflik Politik Antar Pendukung Partai	255
C.	Revitalisasi Konseptual Pencegahan Konflik Kepentingan oleh POLRI	261
D.	Model Standar Konseptual Pencegahan dan Penanggulangan Konflik	269
E.	Model The Police Is Place of Paradigm Shift	273
F.	Model Revitalisasi Kesatuan Sistem Hukum Nasional Republik Indonesia (Model Perkembangan Hukum Pidana Masa Penjajahan Kolonial Belanda menuju Kesatuan Sistem Hukum Nasional)	279
BAB 7	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	291
A.	Kesimpulan	294
B.	Implikasi	298
C.	Rekomendasi	302

LAMPIRAN

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia 305
- Sambutan Tertulis Presiden Republik Indonesia Pada Peringatan Hari Bhayangkara Ke-61 di Jakarta, tanggal 1 Juli 2007 oleh DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia 352

DAFTAR PUSTAKA	359
DAFTAR SINGKATAN	384
INDEKS nama	386
indeks hal	391
TENTANG PENULIS	407